



LEBONG

JUMAT, 30 SEPTEMBER 2022

SUMBER BERITA

<input checked="" type="checkbox"/>	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Prioritaskan Banpol untuk Kegiatan Pendidikan

TUBEI - Sepuluh partai politik (parpol) di Kabupaten Lebong diingatkan profesional dalam mengelola dana bantuan politik (Banpol). Penggunaannya harus tepat sasaran. "Enam puluh persen untuk kegiatan pendidikan politik dan hanya empat puluh persen untuk operasional parpol," ujar Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Lebong, M Ikhrum, S.Sos.

Jika penggunaannya tidak sesuai, Ikhrum pastikan akan berdampak ke penghentian pemberian banpol di tahun selanjutnya. Termasuk rawan dipidana karena akan menjadi temuan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). "Makanya kami kembali mengingatkan soal persentase pemanfaatan banpol," terang Ikhrum.

Dijelaskannya, setiap parpol juga wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban banpol ke Kesbangpol. Selambat-lambatnya laporan itu sudah diterima rentang 30 hari setelah tutup tahun anggaran. "Artinya banpol tahun ini harus disampaikan tidak boleh lewat Januari 2023," jelas Ikhrum.

Sementara Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Lebong, H. Mustarani Abidin, SH, M.Si mengatakan, pagu banpol tahun ini sama dengan tahun sebelumnya. Yakni Rp 850 juta sesuai perhitungan 58.910 suara sah parpol yang mendapatkan kursi di legislatif dalam Pemilu 2019. "Per suara dihargai Rp 14.425," jelas Mustarani.

Pemberian banpol itu menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. Berdasar perolehan suara, Partai Amanat Nasional (PAN) mendapat banpol tertinggi dengan nilai Rp 125,2 juta. Sedangkan Partai Bulan Bintang (PBB) menerima banpol terkecil Rp 45,4 juta. (sca)